



ISSN: 2597-7601

AQLI
Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah**Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan**

Volume 2, Nomor 3, 2018

Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota

M. Firza Alpi, Puja Rizqy Ramadhan

Hal. 103-114



© LPPIAQLI
Jurnal Studi
Akuntansi & Keuangan
Vol. 2 No. 3
Hlm. 103-114

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

M. FIRZA ALPI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: m.firzaalpi@umsu.ac.id

PUJA RIZQY RAMADHAN

Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: pujarizqy@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

- Purposes** – *The purpose of this study is to determine and analyze the influence of the local government characteristics (government size, level of regional wealth, level of dependency on the central government, local expenses) and BPK's audit findings (findings on SPI, findings on incompliance of rules) simultaneously and partially on the financial performance of districts/cities government in North Sumatera.*
- Methods** – *The study population as many as 33 districts/cities of North Sumatera province since 2011-2013. Samples were selected using census method amounted to 99 observation data from 33 districts/cities in North Sumatera in 2011-2013. Data was processed using the method of multiple linear regression statistical test for the first hypothesis using SPSS software.*
- Findings** – *Results of this study prove the hypothesis that the local government characteristics (government size, level of regional wealth, local expenses) and BPK's audit findings (findings on SPI, findings on incompliance of rules) simultaneous effect on the financial performance of district/cities government in North Sumatera. Partial testing reveal only variables level of regional wealth, local expenses, and findings on incompliance of rules, are significantly effect, while the government size and the findings on SPI has no significant effect on the finance performance of local government district/cities in North Sumatera.*
- Keywords** – *Local government characteristics (government size, level of local wealth, local expenses), and BPK's audit findings (findings on SPI, findings on incompliance of rules)*

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan dampak terhadap kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya secara mandiri berdasarkan atas asas otonomi. Semangat desentralisasi dan otonomi sebenarnya telah dimulai sejak Indonesia memasuki era reformasi pada

pertengahan tahun 1998, dimana timbul tuntutan pelaksanaan otonomi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah terutama pada tingkat kabupaten/kota. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 hingga diterbitkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 sebagai penggantinya.

Asas otonomi ini berlaku pula dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya (Zahari, 2008). Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pula kinerja yang memadai dari pemerintah daerah terhadap kewenangannya tersebut.

Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan antar daerah di Indonesia (Priyo, 2005). Kesenjangan ini muncul berkaitan dengan adanya sumbangan akan hasil eksploitasi sumber daya terhadap pembangunan ekonomi yang hanya berkutat di pusat (Kuncoro, 2004). Dalam kaitannya dengan kendala tersebut, maka pemerintah daerah perlu memiliki kinerja yang memadai pula untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencapai tujuan otonomi tersebut. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik (Halacmi, 2005).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Adapun EKPPD ini menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) (Permendagri No. 73 Tahun 2009), dimana hasil dari EKPPD tersebut berupa Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Setiap daerah tentu memiliki karakteristik yang berbeda pada masing-masing daerahnya. Hal ini disebabkan oleh potensi suatu daerah yang berbeda-beda, sehingga suatu daerah boleh jadi memiliki potensi yang lebih besar dari daerah lainnya, termasuk pula potensi keuangannya. Berdasarkan atas asas otonomi, maka potensi keuangan daerah ini tentu akan dioptimalkan pemerintah daerah dalam rangka menopang ketersediaan urusan Pemda tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari penggalan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diperoleh bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena adanya perbedaan PAD dari setiap daerah, maka tingkat kekayaan suatu daerah dari sisi keuangannya akan berbeda pula.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam hal finansial. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Perimbangan yang ditransfer ke Pemda.. Melihat adanya perbedaan ukuran keuangan suatu daerah yang tercermin dari jumlah PAD, maka akan terjadi pula perbedaan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah



© LPPJ AQLI
Jurnal Studi
Akuntansi & Keuangan
Vol. 2 No. 3
Hlm. 103-114



pusat kepada Pemda. Semakin besar PAD suatu daerah, maka dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat akan semakin kecil. Ini berarti tingkat ketergantungan suatu daerah akan semakin kecil kepada pemerintah pusat. Dengan kata lain, tingkat kemandirian suatu daerah dapat dikatakan baik, sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi. Sebaliknya, apabila semakin kecil PAD suatu daerah, maka dana perimbangan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat akan semakin besar, yang berarti tingkat ketergantungan Pemda akan semakin besar pula kepada pemerintah pusat. Menurut Kusumadewi dan Rahman (2007), dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil.

Aset suatu daerah tentu akan berimplikasi pada belanja suatu daerah. Belanja suatu daerah akan sangat bergantung pada berapa besar aset yang dimilikinya. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007. Whittaker (1995) menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Fakta yang terjadi khususnya di Sumatera Utara, masih perlu banyak perbaikan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Hal ini tercermin dari penilaian daftar capaian akuntabilitas kinerja tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Tahun 2015

No.	Instansi Pemda	Nilai	Peringkat
1	Pemerintah Provinsi Di Yogyakarta	80.68	A
2	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	80.04	A
3	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	76.30	BB
4	Pemerintah Provinsi Bali	75.39	BB
5	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	75.15	BB
6	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	75.11	BB
7	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	72.09	BB
8	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	70.52	BB
9	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	70.06	BB
10	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	68.62	B
11	Pemerintah Provinsi Bengkulu	63.74	B
12	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	62.42	B
13	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	61.00	B
14	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	60.96	B
15	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	60.85	B
16	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	60.85	B
17	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	60.69	B
18	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	58.57	CC
19	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	58.65	CC
20	Pemerintah Aceh	58.24	CC
21	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	58.00	CC
22	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	56.25	CC
23	Pemerintah Provinsi Maluku	55.62	CC
24	Pemerintah Provinsi Gorontalo	55.15	CC
25	Pemerintah Provinsi Riau	54.73	CC
26	Pemerintah Provinsi Jambi	52.87	CC
27	Pemerintah Provinsi Lampung	51.13	CC
28	Pemerintah Provinsi Banten	51.12	CC

No.	Instansi Pemda	Nilai	Peringkat
29	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	50.56	CC
30	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	50.23	CC
31	Pemerintah Provinsi Papua	46.03	C
32	Pemerintah Provinsi Papua Barat	32.81	C
33	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	31.24	C
34	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	25.34	D

Sumber : Kempan-RB (2015)



© LPPI AQLI
Jurnal Studi
Akuntansi & Keuangan
Vol. 2 No. 3
Hlm. 103-114

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai 58,00 dengan peringkat CC. Nilai yang diperoleh tersebut menempatkan Provinsi Sumatera Utara di posisi ke-21 dari 334 provinsi di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan lagi kinerja instansi yang bersangkutan, sehingga memiliki peringkat yang lebih baik. Melihat fakta yang terjadi di Sumut, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan karakteristik Pemda Sumut itu sendiri. Potensi keuangan yang besar di Sumut dengan mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan, serta Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan peningkatan yang cukup berarti diharapkan sejalan dengan kinerja keuangan Pemda yang baik pula.

KAJIAN LITERATUR

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja menurut Mangkunegara (2000) dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penelitian yang dilakukan Azhar (2008) mengungkapkan bahwa kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Halacmi, 2005).

Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan, bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2002a). Ekonomis berkaitan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektif merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yang merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Mardiasmo, 2002b). Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala



satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya, misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan sebagainya, SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan wewenang mengelola anggaran.

Karakteristik Pemerintah Daerah

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006), definisi karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Karakteristik perusahaan berkaitan dengan struktur meliputi ukuran (*size*) perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban. Karakteristik berkaitan dengan kinerja (*performance*) meliputi likuiditas perusahaan dan laba (*profit*). Sedangkan dari pendekatan pasar meliputi faktor-faktor kualitatif seperti tipe industri, tipe auditor dan status perusahaan.

Mustikarini & Fitriasari (2012) menjabarkan karakteristik Pemerintah Daerah meliputi ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah. Penelitian ini akan menjabarkan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah dengan aset daerah sebagai indikator, tingkat kekayaan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dengan dana perimbangan sebagai indikator, dan realisasi belanja daerah.

Temuan Audit BPK

Mulyadi (2002) menyatakan bahwa audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya pada pemakai yang berkepentingan. Hal di atas didukung pula oleh pendapat Agoes (2004) yang menyatakan bahwa suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Selain untuk menguji dan memeriksa kelayakan penyajian laporan keuangan, dalam audit atas laporan keuangan, auditor juga disyaratkan untuk menguji efektifitas pengendalian intern, memeriksa kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundangan serta memeriksa kemungkinan terjadinya kecurangan dan ketidakpatutan. Temuan audit yang berupa temuan atas pengendalian intern, temuan atas ketaatan terhadap peraturan perundangan dan temuan kecurangan dan ketidakpatutan selanjutnya harus disajikan menurut elemen temuan yang terdiri dari kriteria, kondisi, sebab dan akibat. Hal ini

dimaksudkan untuk membantu manajemen atau lembaga pengawas dalam memahami perlunya untuk melakukan tindakan perbaikan. Sebagai tambahan auditor juga harus memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan.



© LPPI AQLI
Jurnal Studi
Akuntansi & Keuangan
Vol. 2 No. 3
Hlm. 103-114

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan ukuran pemerintah daerah (aset), tingkat kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat (dana perimbangan), belanja daerah, dan temuan Audit BPK yang diukur dengan temuan audit terhadap SPI (jumlah kasus), temuan audit ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan. Jenis data yang digunakan bersifat Kuantitatif, yaitu berbentuk angka dengan menggunakan instrumen formal, standar, dan bersifat mengukur. Penelitian ini menggunakan data empiris yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara anggaran 2014-2016 dan penelitian ini mengambil waktu pada bulan November 2017 sampai dengan Juni 2018.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan pengujian data dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka untuk menjawab rumusan masalah, serta perhitungan untuk hipotesis yang telah diajukan apakah variabel bebas (karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK) berpengaruh terhadap variabel terikat (Kinerja Keuangan). Setelah itu, diambil kesimpulan dari pengujian data tersebut dengan menggunakan regresi linear.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Uji statistik F berikut ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara serempak mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 1 Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan (F)

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64.999	6	10.833	3.516	.004 ^a
	Residual	243.378	79	3.081		
	Total	308.377	85			

a. Predictors: (Constant), Ukuran Legislatif, SPI, Kepatuhan LN, Ukuran Daerah LN Tingkat Kekayaan Daerah LN, Belanja Daerah LN ; b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan LN

Berdasarkan Tabel 1 hasil pengujian secara simultan pengaruh Perputaran Piutang dan Perputaran Modal Kerja terhadap *Current Assets* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.004 (Sig.<0.05) maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya secara simultan Karakteristik Pemerintah Daerah (ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, belanja daerah) dan Temuan



Audit BPK (SPI dan Ketidakpatuhan) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Uji statistik t berikut ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 2 Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29.086	8.295		3.507	.001
Ukuran Daerah.LN	.176	.417	.079	.421	.675
Tingkat Kekayaan Daerah.LN	1.064	.433	.584	2.455	.016
Belanja Daerah.LN	-3.143	.990	-.836	-3.175	.002
SPI.LN	-.727	.409	-.185	-1.780	.079
Ketidakpatuhan.LN	-1.515	.586	-.261	-2.584	.012
UkuranLegislatif.LN	1.681	1.197	.242	1.404	.164

a. Dependent Variable : Kinerja Keuangan.LN.

Berdasarkan persamaan regresi berganda terlihat nilai-nilai koefisien sebagai berikut: (1) Nilai konstanta sebesar 29,086 artinya jika variabel bebas nilainya tetap maka kinerja keuangan sebesar 29,086 kali; (2) Nilai koefisien Beta untuk indikator Ukuran Daerah adalah sebesar 0,176 artinya setiap kenaikan variabel Ukuran Daerah sebesar 1% maka kinerja keuangan akan naik sebesar 0,176 kali dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan; (3) Nilai koefisien Beta untuk indikator Tingkat Kekayaan Daerah adalah sebesar 1,064 artinya setiap kenaikan variabel Tingkat Kekayaan Daerah sebesar 1 maka kinerja keuangan akan naik sebesar 1,064 kali dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan; (4) Nilai koefisien Beta untuk indikator Belanja Daerah adalah sebesar -3,143 artinya setiap kenaikan variabel Belanja Daerah sebesar 1 maka kinerja keuangan akan turun sebesar 3,143 kali dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan; (5) Nilai koefisien Beta untuk indikator SPI adalah sebesar -0,727 artinya setiap kenaikan variabel SPI sebesar 1 kasus maka kinerja keuangan akan turun sebesar 0,727 kali dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan; (6) Nilai koefisien Beta untuk indikator ketidakpatuhan adalah sebesar -1,515 artinya setiap kenaikan variabel ketaatan sebesar 1 kasus maka kinerja keuangan akan turun sebesar 1,515 kali dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan; (7) Nilai koefisien Beta untuk variabel Ukuran Legislatif adalah sebesar 1,681 artinya setiap kenaikan variabel Ukuran Legislatif sebesar 1 maka kinerja keuangan akan naik sebesar 1,681 kali dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini, berdasarkan tabel 2 memberi beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja keuangan diperoleh nilai signifikansi 0.675 (Sig.>0.05) maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Artinya ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera Utara; (2) Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan diperoleh nilai signifikansi 0.016 (Sig.<0.05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera Utara; (3) Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja



keuangan diperoleh nilai signifikansi 0.002 (Sig.<0.05) maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda Kab/Kota di Sumatera Utara; (4) Pengaruh Temuan Audit BPK dari Temuan Audit SPI terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Berdasarkan tabel 2 hasil pengujian hipotesis pengaruh temuan audit SPI terhadap kinerja keuangan diperoleh nilai signifikansi 0.079 (Sig.>0.05) maka H_a ditolak dan H₀ diterima. Artinya temuan audit SPI tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera Utara; (5) Pengaruh ketidakpatuhan terhadap kinerja keuangan diperoleh nilai signifikansi 0.012 (Sig.<0.05) maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya ketidakpatuhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Diskusi

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini merupakan pembahasan tentang beberapa temuan masalah dalam penelitian.

Pertama. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dari Ukuran Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil pengujian karakteristik pemerintah daerah dari ukuran daerah terhadap kinerja keuangan menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemerintah daerah dari ukuran daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hasil pengujian menolak hipotesis parsial. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriarsi (2012) yang membuktikan ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfiana & Kurniasih (2013).

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu ukuran daerah bukan merupakan faktor penentu tinggi rendahnya kinerja keuangan pemda kab/kota di Sumut. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemda Kab/Kota di Sumut belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilakukan benyak perbaikan dalam pengelolaan aset daerah.

Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.



Kedua, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dari Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil pengujian karakteristik pemerintah daerah dari tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemerintah daerah dari tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hasil pengujian menerima hipotesis parsial. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasaki (2012) yang membuktikan kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu tingkat kekayaan daerah merupakan faktor penentu tinggi rendahnya kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kekayaan daerah yang bersumber dari PAD berarti dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Klasifikasi PAD yang berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketiga, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dari Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil pengujian karakteristik pemerintah daerah dari belanja daerah terhadap kinerja keuangan menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemerintah daerah dari belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hasil pengujian menerima hipotesis parsial. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini & Fitriasaki (2012) yang membuktikan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu belanja daerah merupakan faktor penentu tinggi rendahnya kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah yang menggunakan belanja daerah cukup besar dapat menurunkan kinerja keuangannya, sehingga efisiensi belanja diharapkan dapat dilakukan oleh Pemda. Semakin besar belanja daerah maka semakin besar pula beban daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Keempat, Pengaruh Temuan Audit BPK dari Temuan Audit SPI terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil pengujian temuan audit BPK dari temuan audit SPI terhadap kinerja keuangan menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa temuan audit BPK dari SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hasil pengujian menolak hipotesis parsial. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini & Fitriasaki (2012) yang membuktikan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu temuan audit BPK dari SPI bukan merupakan faktor penentu tinggi rendahnya kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dikarenakan lembaga SPI

Pemda yang masih merupakan bagian dari Pemda itu sendiri, sehingga terindikasi lemah dalam aspek independensinya. Oleh sebab itu, perbaikan sistem pengendalian internal Pemda merupakan hal yang hendaknya perlu dilakukan.

Kelima, Pengaruh Temuan Audit BPK dari Ketidakpatuhan Ketentuan Perundangan terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil pengujian temuan audit BPK dari kepatuhan terhadap kinerja keuangan menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa temuan audit BPK dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian menerima hipotesis parsial. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini & Fitriyani (2012) yang membuktikan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu temuan audit BPK dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan merupakan faktor penentu tinggi rendahnya kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan ketaatan Pemda terhadap ketentuan perundangan berkaitan langsung dengan kinerja keuangan daerah. Setiap pemerintah daerah harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku karena merupakan prosedur dasar dalam menjalankan pemerintahan.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Karakteristik pemerintah daerah (ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, belanja daerah) dan temuan audit BPK (temuan audit terhadap SPI dan temuan audit ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan Pemda Kab/Kota di Sumatera Utara.

Dari pengujian secara parsial hanya indikator tingkat kekayaan daerah, belanja daerah dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan yang berpengaruh signifikan, sedangkan ukuran daerah dan temuan audit terhadap SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda Kab/Kota di Sumatera Utara. Indikator tingkat kekayaan daerah, belanja daerah dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda Kab/Kota di Sumatera Utara.



© LPPI AQLI
Jurnal Studi
Akuntansi & Keuangan
Vol. 2 No. 3
Hlm. 103-114



© LPPIAQLI
Jurnal Studi
Akuntansi & Keuangan
Vol. 2 No. 3
Hlm. 103-114

REFERENSI

- Agoes, S. (2004). *Auditing: Pemeriksaan akuntansi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Azhar, M. K. S. (2008). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah otonomi daerah*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Friedmann, J. (2007). The wealth of cities: towards an assets-based development of newly urbanizing regions. *Development and Change*, 38(6), 987-998.
- Halachmi, A. (2005). Performance measurement is only one way of managing performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 54(1), 502-516.
- Kempan-RB(2015). *Laporan kinerja (LAKIP) 2015*. Jakarta: Kempan-RB.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah : Reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11(1), 67-80.
- Mangkunegara, A. A. P. (2002). *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mardiasmo (2002a). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2002b). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. *Sustainable Competitive Advantage*, 3(1), 1-16.
- Mulyadi. (2002). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustikarini, W. A., & Fitriyari, D. (2012). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007. Simposium Nasional Akuntansi ke-15. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
- Permendagri No. 73 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Permendagri No.17 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
- Priyo, H. A. (2005). Relevansi transfer pemerintah pusat terhadap upaya pajak daerah: Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Jawa. The 2nd National Conference UKWMS. Surabaya: UKWMS.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- Whittaker, J. B. (1995). *Government performance and results act of 1993*. North Carolina: Educational Services Institute.
- Zahari, MS. M. (2008). Analisis pendapatan asli daerah Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 8(3), 9-14.



© LPPI AQLI
Jurnal Studi
Akuntansi & Keuangan
Vol. 2 No. 3
Hlm. 103-114